



Judul : RUU Kepariwisata Usung Paradigma Lebih Berkualitas
Tanggal : Kamis, 19 September 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

RUU Kepariwisata Usung Paradigma Lebih Berkualitas

KOMISI X DPR menekankan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata akan didasarkan pada paradigma baru kepariwisataan, yakni pariwisata berkualitas. Ini didasarkan paradigma baru kepariwisataan dari pariwisata massal (*mass tourism*) kepada pariwisata berkualitas (*quality tourism*).

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan hal tersebut saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi X dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Selain itu, RUU Kepariwisata akan memperkuat identitas bangsa, perekonomian dan pertahanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam dan warisan budaya.

“Pengenalannya dimulai dari pendidikan,” sebutnya.

Pengaturan kelembagaan pariwisata, lanjutnya, merujuk kelembagaan di tingkat global dengan mengutamakan spirit kolaborasi serta menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan.

Pembahasan RUU Kepariwisata ini disepakati dilakukan pada masa Persidangan I Tahun 2024-2025. Namun apabila tidak memungkinkan maka akan dilakukan *carry over* pada DPR periode 2024-

2029.

Sementara, Komisi X DPR menyetujui pagu anggaran definitif Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2025 sebesar Rp 721,6 miliar. Keputusan ini ditetapkan setelah pihaknya menerima Surat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 pada tanggal 10 September 2024.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian saat membacakan laporan singkat agenda Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Plt Perpusnas E. Aminuddin Aziz di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk program yang dibutuhkan oleh publik untuk memperbaiki literasi.

“Komisi X DPR dan Perpusnas sepakat anggaran ini dimanfaatkan untuk program strategis nasional dan program yang dibutuhkan publik dengan memperhatikan saran, pandangan dan usulan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Sebagai informasi, pagu anggaran definitif Kemenparekraf tahun 2025 akan dimanfaatkan untuk 2 program utama. Di antaranya program Perpustakaan dan Literasi sebesar Rp 459,5 miliar dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp 262,08 miliar. ■ KAL